

BAB II

KONDISI POLITIK DOMESTIK THAILAND

Dalam penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat tiga faktor determinan dalam mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan. Ketiga faktor determinan pertimbangan di atas telah memiliki peran yang saling berhubungan dalam mempengaruhi setiap pertimbangan para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Di mana pada konteks dalam negeri yaitu terdiri atas politik dalam negeri, kekuatan ekonomi dan militer berperan bersama dengan konteks internasional dalam membentuk arah politik luar negeri. Sehingga ketiga pertimbangan tersebut tidak berdiri secara terpisah karena saling memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan.

Adanya deforestasi dan kebakaran di Indonesia menimbulkan terjadi permasalahan secara signifikan. Sebab deforestasi dan kebakaran hutan tersebut secara langsung kabut asap lintas batas negara yang menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang kabut asap di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, berhubungan dengan kebakaran hutan di Indonesia yang telah menjadi isu lingkungan, maka pemerintah Indonesia juga memiliki tanggung jawab terhadap pencemaran udara lintas batas negara. Di mana dalam segi hukum internasional, tanggung jawab negara merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain (Wallace, 2002, p. 175). Sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini memiliki tanggung jawab terhadap pencemaran udaralintas batas negara yang terjadi di Asia tenggara. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary haze pollution*

(AATHP). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara berkelanjutan.

Deforestasi dan kebakaran hutan telah menimbulkan kabut asap lintas batas negara. Kabut asap ini terjadi karena diakibatkan oleh adanya deforestasi dan kebakaran hutan yang sangat parah di beberapa wilayah Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan menimbulkan kerugian yang signifikan pada beberapa sektor, yaitu sektor kesehatan, perekonomian, dan pariwisata. Bahkan dalam hal ini, kerugian tersebut juga terjadi di beberapa negara Asia Tenggara yang terkena dampak dari kabut asap lintas batas negara. Di mana Thailand merupakan salah satu negara yang terkena dampak akibat kabut asap dari Indonesia.

Pemerintah Thailand telah melakukan penanggulangan dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah Thailand bersama negara Asia Tenggara, baik secara bilateral maupun regional dalam hal ini melakukan kerja sama yang diharapkan dapat menanggulangi dampak dari kabut asap yang terjadi (Suryani, 2012, p. 67). Sehingga kerja sama tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap lintas batas negara. Selain itu, secara otomatis hubungan kerja sama yang dilakukan dapat menjaga dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan negara Asia Tenggara secara umum. Apalagi dalam permasalahan kebakaran hutan ini, Thailand merupakan salah satu negara yang terkena dampak kabut asap lintas batas negara akibat kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, sehingga dampak tersebut berpengaruh pada kondisi domestik Thailand yaitu pada sektor birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan dan media massa. Yang lebih lanjutnya akan penulis analisis menggunakan empat variabel dalam *Rational Choice Theory*, yaitu:

2.1 Birokrasi

Dalam hal ini terdapat pihak “*bureaucratic influencer*” yang mempengaruhi terciptanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. William D. Coplin menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut adalah mereka yang masuk kedalam lembaga eksekutif dalam sebuah pemerintahan (Coplin, 1992, pp. 81-82). Dengan demikian maka dari itu dalam merespon kebakaran hutan yang berdampak di Thailand dan bertanggung jawab oleh birokrat adalah kementerian.

➤ **Kementerian Luar Negeri**

Desakan pemerintah Thailand terhadap Indonesia untuk menyelesaikan kebakaran hutan berasal dari kementerian luar negeri. Dalam hal ini menjalankan fungsi sebagai pihak yang mendapatkan mandat untuk mengatur hubungan luar negeri. Menurut peraturan tersebut kementerian luar negeri memiliki sepuluh fungsi, yaitu:

- a. Mewakili Pemerintah Kerajaan Thailand dalam konferensi dan negosiasi internasional untuk melindungi, memelihara, dan mempromosikan kepentingan nasional Thailand dalam forum bilateral dan multilateral, dan untuk berpartisipasi dalam pembentukan prinsip dan norma internasional.
- b. Mengawasi kebijakan luar negeri Thailand dan memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga-lembaga lain tentang kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan urusan luar negeri dan hukum internasional.
- c. Melindungi dan mempromosikan hak dan kepentingan warga negara Thailand yang tinggal atau bepergian ke luar negeri, serta menyediakan layanan konsuler.

- d. Mempromosikan dan memfasilitasi transfer pengetahuan, pengetahuan, dan praktik terbaik dari luar negeri serta norma-norma internasional dengan tujuan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial Thailand.
- e. Tingkatkan kepercayaan internasional dalam, dan citra positif, Thailand.
- f. Melakukan fungsi protokol yang sejalan dengan praktik internasional untuk mendukung tugas-tugas di luar negeri.
- g. Mempromosikan dan mengimplementasikan kerja sama pembangunan Thailand di tingkat bilateral dan multilateral.
- h. Membangun dan menyebarkan pengetahuan tentang urusan luar negeri untuk mempromosikan pemahaman semua sektor masyarakat Thailand dan publik Thailand.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan luar negeri dengan semua sektor terkait di Thailand.
- j. Meningkatkan kemampuan dan efektivitas organisasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dengan melihat mengenai fungsi dari Kementerian Luar Negeri maka diketahui bahwa urusan luar negeri, kemudian urusan diplomasi, negosiasi dan hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri diurus oleh Kemenlu (Thailand). Dalam konteks kebakaran hutan dan deforestasi yang disebabkan oleh pembakaran hutan ilegal di Indonesia yang mengakibatkan kabut asao di Thailand, maka kemenlu Thailand berperan penting karena kaitan masalah ini adalah lintas negara.

Dalam upaya mengatasi kebakaran hutan kementrian luar negeri Thailand memanggil Duta Besar Indonesia untuk Thailand untuk menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia, mengingat dampaknya terkena di Thailand. Dalam pertemuannya dikutip oleh wartawan BBC Indonesia Jerome Wirawan mengatakan bahwa

(Wirawan, 2015): “Mereka menyampaikan concern mengenai dampak asap yang sudah sampai di beberapa provinsi di Thailand selatan yang berbatasan dengan Malaysia”.

Masih dalam sumber yang sama BBC Indonesia melaporkan Sehari sebelumnya, dalam pernyataan kepada wartawan, Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayut Chan-ocha, memerintahkan menteri luar negerinya untuk menghubungi Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Luthfi Rauf, untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan.

“Tahun ini adalah kondisi yang terburuk. Sumber masalahnya bukan berasal dari kami, namun berdampak pada kami dan sahabat-sahabat kami di wilayah ini” kata Jenderal Prayut Chan-ocha sebagaimana dikutip kantor berita AFP. Soal keluhan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, mengatakan wilayah ASEAN memiliki mekanisme tersendiri untuk menangani kabut asap. Sudah ada mekanismenya sendiri di ASEAN melalui ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (Wirawan, 2015).

Artinya bahwa kementerian luar negeri Thailand telah melakukan berbagai upaya sebagai diplomasi luar negeri untuk mencoba mengatasi masalah kebakaran hutan di Indonesia dengan pendekatan structural birokrasi sebagai departemen yang tentunya diatur UU Thailand sebagai agen yang mengurus hal-hal yang berkaitan eksternal dalam mengejar kepentingan negara Thailand.

2.2 Partai Politik

Pada komponen kedua adalah partai politik, di mana William D. Coplin mengatakan bahwa partai politik merupakan *partisan influencer*. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat dipahami bahwa partai politik melakukan keberpihakan terhadap aktor politik, yang mana dalam hal ini yaitu eksekutif. Selain itu, berdasarkan fungsinya, partai politik menyalurkan tuntutan-

tuntunan masyarakat kepada para pengambil kebijakan sehingga para pengambil kebijakan dapat ditekan oleh kelompok ini (Coplin, 1992, pp. 84-85). Sebab dalam konteks ini perdana menteri atau pejabat terkait merupakan kader partai. Di mana parta politik menjadi kendaraan politik dalam sistem demokrasi. Sehingga perdana menteri berasal dari partai politik merupakan sebagai perpanjang tangan dari partai politik. Perdana menteri menggunakan suaranya dengan membawa namapartai yang telah menjadi kendaraan politiknya.



a) Perdana Menteri

Dalam konteks ini perdana menteri Thailand yaitu Prayut Chan-o-cha On merupakan elit partai Palang Pracharath Party (*People's State Power Party*). Ia mengatakan bahwa menerima jaminan dari perwakilan pemerintah Indonesia terhadap pihaknya dan berjanji segera menyelesaikan masalah tentang polusi udara yang timbul dari kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan. *The Nation* melaporkan bahwa meskipun PM tidak akan mengungkapkan nama wakilnya, dia mengatakan itu adalah wakil presiden pemerintah dan Indonesia hanya memiliki satu wakil presiden, yaitu Jusuf Kalla. Prayut bertemu dengan Kalla saat menghadiri Sidang Umum PBB di New York. PM mengatakan bahwa memahami pihak berwenang Indonesia dalam melakukan segala kemungkinan untuk mengatasi kebakaran hutan. Selain itu, penduduk di selatan Thailand yang mana banyak di daerah tersebut telah dilanda kabut asap harus menjaga diri mereka aman dari polusi udara.

Menurut media (*The Thaiger & The Nation*, 2019), PM Prayut Chan-o-cha mengatakan bahwa pemerintahnya selalu khawatir tentang polusi udara, terutama PM2.5 atau partikel debu mikroskopis yang disebabkan oleh kabut asap dari Indonesia, kemacetan lalu lintas, pembakaran pertanian limbah, emisi pabrik dan debu dari lokasi konstruksi.

“PM2.5 is dangerous, especially for children, babies, pregnant women and elders, whose immunity is too fragile to tackle the microscopic dust.”

“People should be particularly careful during December as there are no winds or rain to blow away the dust.”

Dia juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik, mengatakan perlu memahami semua masalah terlebih dahulu. Dia menjelaskan bahwa Kabinet menyetujui proposal minggu lalu untuk mengatasi krisis polusi di empat tingkat.

“We have explained them to all provinces and have asked for coordinated cooperation”.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa perhatian terhadap dampak negatif kabut asap menjadi *concern* perdana menteri Thailand. Menjadi perhatian perhatian kepala negara karena dampak dari kebakaran hutan mempengaruhi kesehatan masyarakat, mempengaruhi perekonomian hingga citra Thailand. Untuk itulah pernyataan perdanan menteri Thailand dapat dikatakan mewakili suara Thailand. Patutnya suara ini dapat dipertimbangkan Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah.

b) Parlemen

Upaya mengatasi kabut asap tidak hanya perdana menteri Thailand, upaya tersebut juga dilakukan oleh parlemen Thailand. Parlemen Thailand tentu pastinya dalam system demokrasi di isi oleh partai politik dalam kata lain anggota parlemen Thailand juga merupakan kader partai politik.

Sattra Sripan, anggota Parlemen dari Partai Palang Pracharat untuk Songkhla, bertemu dengan konsulat jenderal Indonesia Fachry Sulaiman untuk menyerahkan sebuah petisi yang menyerukan negara tetangga (Indonesia) untuk menangani dan mencegah kabut asap dari kebakaran hutan, telah menyelubungi Songkhla dan provinsi perbatasan selatan.

“People have to wear face masks and refrain from outdoor activities, while some have already developed respiratory problems,” Konsul menjawab dengan mengatakan bahwa Indonesia melakukan segala yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan bahkan

menangkap mereka yang berada di belakangnya, karena masyarakat Indonesia juga menderita kabut asap. Dia juga mencatat bahwa dalam banyak kasus, kebakaran hutan disebabkan secara alami dari pembakaran dan panas termal bawah tanah.

2.3 Kelompok Yang Berkepentingan

Variabel ketiga ini adalah “*interest influencers*” yaitu terdiri dari beberapa orang yang bergabung dalam sebuah kelompok dengan memiliki tujuan dan kepentingan bersama (Coplin, 1992, p. 87). Dalam hal ini merugi adalah perusahaan maskapai Thai Airways yang menunda penerbangan disebabkan oleh kabut asap.

➤ **Thai Airways**

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kebakaran hutan di Indonesia berdampak terhadap kabut asap yang mengakibatkan penerbangan terganggu. Kebakaran hutan di Indonesia menjadi masalah besar di Thailand yang membuat jadwal penerbangan tertunda. Penyebaran kabut asap yang berasal dari Indonesia membuat jadwal penerbangan bandara Internasional Chiang Mai terganggu.

Kabut asap dan polusi udara yang berasal dari Indonesia menyelimuti negara Thailand dan membuat level udara tidak sehat. Tercatat pada umumnya limit aman partikel debu hanya 120 mikrogram per kubik udara. Namun dengan adanya kiriman kabut asap dari Indonesia membuat partikel debu mencapai 202 mikrogram per kubik udara.

Penerbangan pesawat Thai Airways Internasional dengan nomor maskapai TG102 yang sesuai jadwal berangkat dari Bangkok ke Chiang Mai namun tidak bisa mendarat di bandara Chiang Mai dikarenakan kabut asap yang tebal hingga pesawat Thai Airways terpaksa kembali ke Bangkok dan menunggu sampai sore hari untuk mencoba kembali terbang ke Chiang Mai.

Tidak hanya pesawat Thai Airways yang menunda penerbangan namun ada maskapai lain yang menunda penerbangan ke Chiang Mai seperti Nok Air dan Bangkok Air Airways yang membuat jadwal ulang penerbangan menuju Chiang Mai (Primus, 2014).

Dengan demikian, adanya kabut asap lintas batas negara yang bersumber dari kebakaran hutan di Indonesia telah berdampak terhadap kondisi domestik Thailand. Di mana dampak tersebut berpengaruh pada kondisi domestik Thailand yaitu pada sektor perusahaan penerbangan Thai Airways Internasional. Di mana Thailand merupakan salah satu negara yang terkena dampak kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia. Deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan kabut asap lintas batas negara memiliki dampak yang signifikan terhadap Thailand yang membuat jadwal penerbangan Thai Airways terganggu.

➤ **Greenpeace**

Polusi udara menjadi sorotan di dunia sebab salah satu kota wisata di Bangkok yang sangat populer dan banyak wisatawan yang berkunjung ke Bangkok. Akan tetapi, banyak penduduk mengeluh tentang kabut asap yang terjadi di Thailand. Maka dari itu Greenpeace mengatakan Bangkok menderita polusi udara terburuk. Departemen pengendalian pencemaran menjelaskan tingkat udara di Thailand mencapai partikel kecil lebih dari 2,5 mikrometer atau partikel debu PM2.5 yang dimana udara yang terjadi di Thailand termasuk yang paling berbahaya dan meminta anak-anak untuk tetap tinggal di dalam rumah (Lefevre, 2018).

Aktivis Greenpeace memberikan pesan kepada perwakilan pemerintah di Bangkok yang menyimpulkan bahwa Thailand sedang dalam bahaya polusi udara. Bangkok tidak bisa terus menghirup udara yang sangat berbahaya kepada kehidupan masyarakat dan memengaruhi produktivitas ekonomi Thailand. Maka dari itu kelompok lingkungan hidup Greenpeace meminta

kepada Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha untuk mengatasi krisis polusi udara di Bangkok (Lefevre, 2018).

Dengan demikian dengan adanya kabut asap yang terjadi di Thailand berdampak terhadap kondisi domestik Thailand. Dimana dampak tersebut berpengaruh kepada sektor kesehatan dan ekonomi Thailand dan melalui aktivis Greenpeace menyuarakan kepada Perdana Menteri Thailand untuk mengatasi polusi udara yang buruk terjadi di Thailand.

2.4 Media Massa

Variabel keempat adalah Media Massa atau “*mass influencers*”, dalam hal ini adalah media massa yang dapat melakukan pembuatan opini dalam masyarakat (Coplin, 1992, pp. 88-9). Secara garis besar terdapat tiga jenis “*framing*” yang dilakukan oleh media mengenai sebuah isu. Dengan demikian keluaran dari sebuah opini terbentuk oleh adanya pemberitaan media masa. Adapun tiga jenis tersebut adalah; *Pertama*, positif, dalam hal ini media massa sebagai mass influencer memberikan opini dan pemberitaan yang positif mengenai sebuah isu. *Kedua*, negatif, pada konteks ini media massa memberikan opini atau pemberitaan yang lebih menyudutkan suatu isu. *Ketiga*, netral, dalam hal ini media massa tidak melakukan framing dan atau pemberitaan yang positif maupun negatif. Melainkan secara objektif melaporkan perkembangan terakhir.

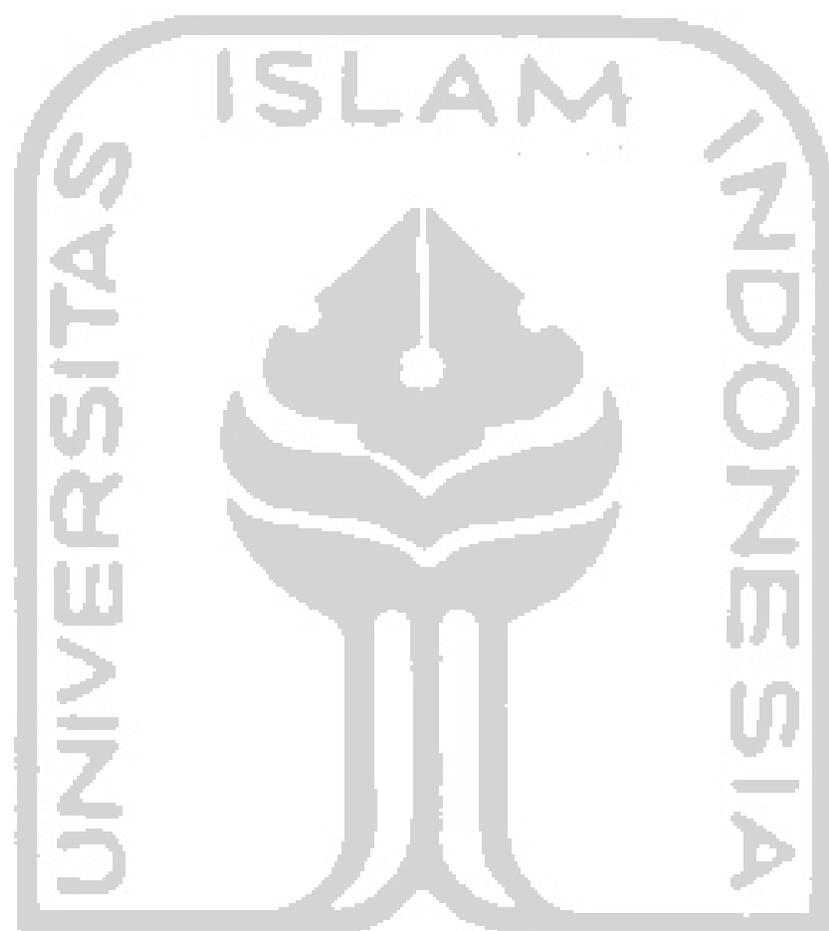
Dalam konteks ini peran media dalam melakukan framing terkait dampak deforestasi atau kebakaran hutan di Indonesia terhadap kerugian-kerugian yang dialami Thailand akan di data sebagai berikut:

No	Nama Media	Isi	Situs
1	The Thaiger	Thai PM says Indonesian government promises to control air pollution from forest fires	https://thethaiger.com/news/air-pollution/thai-pm-says-indonesian-government-promises-to-control-air-pollution-from-forest-fires
2	Thainews	Forest fire causes smog in Phayao	http://thainews.prd.go.th/en/news/detail/TCATG190331165806797
3	The Star	Thai popular resort island Phuket shrouded in haze caused by Indonesian fires	https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/09/23/thai-popular-resort-island-phuket-shrouded-in-haze-caused-by-indonesian-fires
4	Thaivisa	Battle against forest fires continues as pollution levels rise	https://news.thaivisa.com/article/33761/battle-against-forest-fires-continues-as-pollution-levels-rise

5	Bangkok Post	Disaster zones declared over forest fire	https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1722679/disaster-zones-declared-over-forest-firedukung-timor-leste-jadi-anggota-asean/
6	The Nation Thailand	Millions of rai of forested land destroyed by wildfires	https://www.nationthailand.com/national/30367627

Tabel 1: Media Massa Thailand (Sumber: Diolah oleh penulis).

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa media menetapkan framing positif se framing positif sesuai dengan fakta objektif, dan dengan sentuhan framing seolah Thailand mendapat kerusakan dan kerugian yang cukup besar dari dampak deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa media massa memberitakan objektif yang juga objektifitas ini sesuai menggambarkan kepentingan Thailand. Selain itu isu ini tidak menjadi pokok bahasan oleh media, karena meskipun urgen bagi pemerintah namun tidak dipandang urgen bagi media di Indonesia.



جامعة الإسلام في إندونيسيا